

**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI DESA PATIMPA KECAMATAN PONRE
KABUPATEN BONE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan
Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

OLEH :

ACHMAD ARIF GUNAWAN

NIM : 10500113280

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ARIF GUNAWAN
NIM : 10500113280
Tempat/Tgl. Lahir : WATAMPONE, 30 JANUARI 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : Perumahan Baruga Samata
Judul : Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam
Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa
Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dangelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 26 Juli 2017

Penulis

Achmad Arif Gunawan
NIM: 10500113308

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”, yang disusun oleh saudara Achmad Arif Gunawan, NIM: 10500113280, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 22 Agustus 2017
29 Zulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Istiqamah, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Andi Safriani, S.H., M.H	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 1993003 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas administrasi Pemerintahan di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”. , shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi yang terakhir Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam perjalanan menyelesaikan laporan penelitian ini, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materil untuk ibu tercinta Atik S.Pd, ayahanda Hasim Latif S.Pd., M.Si terimakasih yang tak terhingga beserta saudara-saudari penulis Aprilia Dwi Hastika, Abdillah Ramadhan, Khumairah Inayah Hastika, serta kakek, nenek, sepupu, tante dan paman yang telah membantu mengasuh dan membesarkan peneliti dan telah membiayai pendidikan sampai selesainya skripsi ini, peneliti senantiasa selalu mendoakan agar Allah SWT selalu menjaga dan memberikan kebahagiaan.

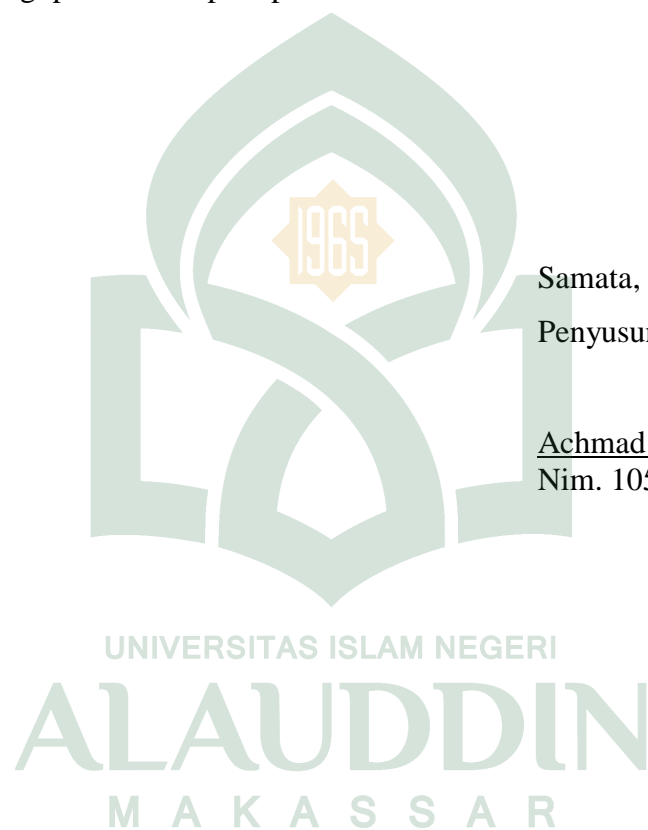
Dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulia menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak *Prof. Dr. H. Musafir Pababbari*, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah, S.H. M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah mengizinkan peneliti untuk mengangkat skripsi dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.
4. Bapak Dr. Jumadi., S.H. M.H. dan Ibu Dr. Andi Safriani., S.H. M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran beliau sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Pimpinan, Karyawan dan Staf di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak Kepala Desa Patimpa Herkiswanto beserta perangkat desa dan seluruh warga Desa Patimpa yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di desa patimpa.
7. Nisda Amriani Aristi S. Farn, Apt beserta keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Kelas Ilmu Hukum F, yang selama ini menjadi teman seperjuangan, dan teman berbagi suka dan duka.
9. Sahabat seperjuangan dan teman yang telah mengisi sejarah hidup penulis.
10. Saudara-saudari penulis di Kepmi Bone Komisariat Latenriruwa dan IMHB (Ikatan Mahasiswa Hukum Bone) yang telah mengajarkan peneliti arti dari persaudaraan.

11. Kawan-kawan KKN Reguler angkatan 55 Kec.Tompobulu Kab.Gowa, khususnya teman posko penulis yang telah mewarnai hari-hari di lokasi KKN Reguler di Desa Rappoala dan telah banyak memberikan pengalaman hidup.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca



Samata, 26 Juli 2017

Penyusun

Achmad Arif Gunawan
Nim. 10500113308

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1-11
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Hipotesis	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Tinjauan Pustaka	8
 BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	 12-50
A. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	12
1. Istilah dan Pengertian Desa.....	12
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	23
3. Otonomi Desa	30
B. Konsep Kemampuan Perangkat Desa	38
C. Konsep Administrasi Pemerintahan Desa	41
1. Pengertian Administrasi.....	42
2. Administrasi Desa.....	44
D. Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa	49
 BAB III METODE PENELITIAN	 51-54

A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Instrumen Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	53
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55-74
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
B. Struktur Organisasi dan Tupoksi	56
C. Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa	63
1. Pembinaan Disiplin Aparat.....	64
2. Pendidikan dan Pelatihan	66
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Pemerintah Desa...	69
1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa.....	69
2. Pelayanan Masyarakat.....	70
3. Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	71
4. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.....	72
 BAB V PENUTUP	75-77
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu	10
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi	57
Gambar 4.2. Pelatihan Bidang Pengelolaan Keuangan	67
Gambar 4.3. Kondisi Jalan	72



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrop

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTan da	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>fathahdanalifa</i> tauva	a	a dan garis di atas
اِ... اِ...	<i>kasrahdanaya</i>	i	i dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِمَ : *nu‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّامْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ : *ta‘muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُْمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *dinullah* يَا اللهُ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muhammadunillarasul*
Innaawwalabaitinwudi 'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan
Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n
 Nasir al-Din al-Tusi
 Abu Nasr al-Farabi
 Al-Gazali
 Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

BW	= Burgerlijke Wetboek
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
Jo	= Juncto
JPU	= Jaksa Penuntut Umum
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KUHP	= Kita Undang-Undang Hukum Pidana

No	= Nomor
NRI	= Negara Republik Indonesia
R.I	= Republik Indonesia
Rp	= Rupiah
RUU	= Rancangan Undang-undang
UU	= Undang-undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
HAM	= Hak Asasi Manusia
Sdr	= Saudara
swt.	= Subhanau wa ta'ala
saw.	= Sallallahu 'alaihi wa sallam
WvS	= Wetboek van Strfrecht
QS	= Qur'an Surah

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= الى اخرها الى اخره
ج	= جزء

ABSTRAK

Nama : Achmad Arif Gunawan
Nim : 10500113280
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Patimpa Kec. Ponre Kab. Bone ? Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Patimpa Kec. Ponre Kab. Bone ?

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiri/sosiologis. Instrumen penelitian dalam pengambilan data adalah pedoman wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan disiplin kerja aparatur serta melakukan pendidikan dan pelatihan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisaa:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan Ulil Amri kalian”

Hakikat besar yang terkandung dalam suarat An-Nisaa’ ayat 59 ini melukiskan kaidah pokok dalam tashawwur islami, yang menjadi berpijaknya kehidupan bersama, yang mengatur bagaimana al-Quran menyikapi politik dalam pemerintahan maupun Negara. Secara garis besar definisi atau makna dari "politik" adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara sesuai *rules* agar kebahagiaan bersama di dalam masyarakat di sebuah Negara tersebut lebih mudah tercapai.

Dalam hitungan hari ke depan seluruh masyarakat Indonesia akan segera berpartisipasi dalam Pemilu serentak 2017 yang tentunya kampanye serta pernak-pernik partai politik dan umbaran janji sudah marak di sajikan demi mendapatkan suara terbanyak. Terlepas dari itu semua, siapa pun yang akan menjadi kepala roda pemerintahan Indonesia, yang tentunya akan memimpin

selama 5 tahun, sebagai warga Indonesia yang baik harus patuh dalam pemerintahan tersebut. Ini yang menjadi permasalahan kita, jika roda pemerintahan tidak dipimpin oleh sosok yang kita pilih, terkadang kita enggan untuk patuh terhadap pemerintah dengan dalih tidak puas ataupun politik yang dianut tidak sesuai dengan harapan. Padahal kesatuan dan saling mendukung itu perlu dalam merancang kemajuan Negara dan pembangunan. Bukan justru adanya perbedaan politik menjadi penghalang untuk maju.

Dengan adanya pemilu serentak akan mendatangkan sosok pemimpin untuk memerintah mulai dari tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten demi kemajuan Negara dan Pembangunan. Di tingkat Kabupaten masih ada jajaran pelaksanaan tugas pemerintah mulai dari Bupati dan perangkat daerah, sehubungan dengan itu seperangkat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Peraturan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengatur pokok pokok pengertian Pemerintah Pusat dan Daerah, administrasi pemerintahan di daerah, administrasi pemerintahan di desa dan kelurahan, kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.¹

Tidak lupa pula terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014, Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

¹ Prof. Drs. C.s.t Kansil, S.H, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), h 19.

Republik Indonesia Tahun 1945.² Tepatlah kiranya untuk mencapai kemajuan Negara dan Pembangunan, desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi kemajuan Negara dan Pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan penyelenggara desa atau pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Kepala Desa dan perangkatnya sebagai pelaksana pemerintah desa yang seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintah terutama perangkat desa yang berada langsung dibawah kepala desa, sebagaimana Perangkat Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi.

Keberadaan perangkat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No 6 Tahun 2014*.

bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”. Dengan demikian perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berangkat dari pemikiran tersebut dan dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mendatangkan banyaknya peraturan-peraturan baru dan teknis pelaksanaan pemerintahan dan administrasi desa yang menuntut Kepala Desa dan Perangkatnya agar lebih kompeten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, serangkain dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (problem solving) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun peraturan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani

masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional.

Lebih lanjut peraturan tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Manajemen Pelayanan Desa.³. Dikaitkan dengan kondisi sementara di Desa Patimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itulah penulis mengajukan judul Skripsi ***“Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan di Desa Patimpa Kec. Ponre Kabupaten Bone.”***

³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Pasal 11 dan 12.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah strategi untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam bidang pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan dalam kedisiplinan administrasi pelayanan
2. Adanya pendidikan dan pelatihan dalam bidang administrasi

C. Rumusan Masalah

Mengingat ruang lingkup tugas pemerintahan desa demikian luas dan kompleks, hal mana menjadi tugas pemerintah desa maka dalam kajian ini akan membatasi pada pelaksanaan tugas "Administrasi Pemerintahan dalam Arti Sempit", dan agar penulisan ini lebih terfokus maka masalahnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Patimpa Kec. Ponre Kab. Bone ?
2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Patimpa Kec. Ponre Kab. Bone ?

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Masih kurangnya kemapuan sumber daya Perangkat Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sebagai

penyelenggara yang belum optimal.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Patimpa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Patimpa.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di dunia administrasi Negara terkhusus ilmu hukum tata Negara. Selain itu diharapkan juga bias dijadikan bahan rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama dan obyek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten terkhusus Pemerintah Desa Patimpa dan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa bagi kebutuhan pembangunan desa

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lita E. Lengkey yang berjudul “Peranan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintah Di Desa Amongena Kecamatan Langowan Timur” Dalam penelitian ini, kemampuan jajaran perangkat desa dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat dilihat dan diukur dari apakah prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat sudah dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh perangkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Lita E. Lengkey ini difokuskan pada masalah bagaimana kemampuan kerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi di Desa Amongena belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural hal ini terlihat dari peran perangkat desa tidak berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti sekretaris Desa yang kebanyakan hanya bertugas di kecamatan, padahal tugas pokok seorang sekretaris desa dalam UU No. 6 Tentang Desa adalah sekretaris desa membantu kepala desa dalam hal administrasi desa,⁴ terdapat pula 3 faktor yang mempengaruhi aparat dalam penyelenggaraan tertib administrasi adalah kemampuan aparat, sumber daya manusia dan sarana prasarana, di Desa Amongena kemampuan aparat dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi secara maksimal, salah satu penyebab adalah pendidikan para aparat, hal yang sama juga adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi.

⁴ Republik Indonesia, *UU NO. 6 Tentang Desa*.

Penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2012 yang berjudul “ Analisis Kemampuan Kerja Aparat Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat”. Dalam penelitian ini, kemampuan jajaran pemerintahan kota dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat dilihat dan diukur dari apakah prinsip – prinsip pelayanan kepada masyarakat sudah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh aparatur tingkat kecamatan. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan ini difokuskan kepada masalah bagaimana kemampuan kerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan di bidang administrasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan di Medan sudah baik. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja menurut aparatur 81 dan menurut masyarakat 72%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui pula bahwa kedisiplinan aparatur Kecamatan di Kota Medan sudah baik, pemberian pelayanan sudah cepat, aparatur kecamatan sudah tanggap terhadap keluhan masyarakat dan cepat dalam penanganan keluhan masyarakat, kepastian jadwal pelayanan, aparatur kecamatan juga sudah memahami kebutuhan masyarakat dan pemberian pelayanan kepada semua lapisan masyarakat, dan pemberian layanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa pilih – pilih. Bila dilihat dari tingkat

kepuasannya, masyarakat umumnya merasa puas dengan kinerja aparatur kecamatan di Kota Medan.

Selanjutnya, untuk dapat melihat perbedaan maupun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan data tersebut ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Lita E. Lengkey	Peranan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintah Di Desa Amongena Kecamatan Langowan Timur	Perbedaannya berada pada tujuan penelitian yang dimana Lita E. Lengkey berfokus pada hanya peranan perangkat desa sedangkan peneliti berfokus pada upaya peningkatan pemerintah desa	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti adalah kedua peneliti mengadakan penelitian yang dimana penelitian hanya dalam lingkup desa dan penelitian yang juga dilakukan mengenai pembahasan yang sama menekankan pada kinerja perangkat /pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2012	Analisis kemampuan Kerja Aparat Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan merupakan perpaduan penelitian kuantitatif dan kualitatif sedangkan	Persamaannya adalah pembahasannya tentang kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan terutama dalam pelayanan administrasi jika Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan sama menggunakan desa dalam penelitiannya

		peneliti menggunakan metode penelitian empiris	
Achmad Arif Gunawan (2016)	Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone	Kelebihan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini nantinya akan lebih detail membahas tentang upaya, upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam peningkatan kemampuan administrasi dari perangkat desanya	

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Istilah dan Pengertian Desa

Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam Negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislative dan yudikatif¹. Istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun².

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu.

¹ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Rajawali Pers,2006), h 24.

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa.html> (9 Agustus 2017).

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri³. Jika ditinjau dari segi Geografis menurut Beratha berpendapat bahwa : Desa adalah sebagai “suatu unsur perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain⁴. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi Pengertian Administrasi Desa, Daldjoeni memberikan batasan tentang Desa adalah sebagai “suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri⁵.

Demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk pelipur lara. Masyarakat desa tidak hanya dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Roda berputar, zaman berubah, orde baru berlalu, era

³Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984) hal 11.

⁴ I Nyoman Beratha, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) h 26.

⁵ Daldjoni, N, *Geografi Kota dan Desa* (Bandung: Penerbit Alumni, 1987) h 45.

reformasi bergulir, aspirasi masyarakatpun mengalir. Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan yang dilandasi demokrasi, perlu disusun dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu ditinjau ulang kelemahan dan kelebihan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah/desa selama ini sesuai dengan tuntutan reformasi⁶.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

⁶ Widjaja AW, *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Bahan Kuliah, 2001) h 43-45.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 angka 43.

Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa¹⁰.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis¹¹. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa¹². Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa¹³. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 1 angka 1.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 1 angka 2.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 1 angka 3.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 1 angka 4.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 1 angka 6.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Desa*, Pasal 1 angka 8.

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi¹⁴.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 1 angka 9.

kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pengaturan Desa berdasarkan: rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan¹⁵. Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Desa*, Pasal 3.

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan¹⁶.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota¹⁷. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat¹⁸. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat¹⁹. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa²⁰. Penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²¹. Penataan bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 4.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 5.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 6 ayat

1.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 6 ayat

2.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 7 ayat

1.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 7 ayat

2.

- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa²².

Penataan meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa²³. Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada²⁴. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa²⁵.

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota, sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 7 ayat

1.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 7 ayat

2.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 8 ayat

1.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 8 ayat

2.

pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶. Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa²⁷. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan²⁸. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk²⁹.

Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun³⁰. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi³¹. Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategi³². Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini³³.

Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan

-
3. ²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 8 ayat
 4. ²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 8 ayat
 5. ²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 8 ayat
 6. ²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 8 ayat
 7. ³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 8 ayat
 7. ³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 8 ayat
 - ³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 9.
 - ³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 10.

prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa³⁴. Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota³⁵.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁶. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa³⁷. Pendanaan perubahan status kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota³⁸. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional³⁹.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 11 ayat 1.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 11 ayat 2.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 12 ayat 1.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 12 ayat 2.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 12 ayat 3.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 13.

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah⁴⁰. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa⁴¹. Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴².

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa⁴³. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa⁴⁴. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 14.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 18.

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 19.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 20.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 21.

Desa⁴⁵.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 22 ayat 2.

bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga⁴⁶.

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa

⁴⁶<https://pramudyarun.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan=desa-2/html>.(10 agustus 2017)

warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa⁴⁷.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa⁴⁸. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman; dan partisipatif⁴⁹.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain⁵⁰. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa⁵¹. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan

⁴⁷http://www.academia.edu/11080401/Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Desa_Berdasarkan_UU_DESA.html, (10 Agustus 2017).

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 23.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 24.

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 25.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 26 ayat 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai, perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵².

Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis⁵³. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian⁵⁴. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 26 ayat 1.

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 30 ayat 1.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 30 ayat 2.

di seluruh wilayah Kabupaten/Kota⁵⁵. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁵⁶. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak atau berdasarkan Peraturan Pemerintah⁵⁷.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa⁵⁸. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil⁵⁹. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan⁶⁰. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa⁶¹. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa⁶². Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 31 ayat 1.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 31 ayat 2.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 31 ayat 3.

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 34 ayat 1.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 34 ayat 2.

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 34 ayat 3.

⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 34 ayat 4.

⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 34 ayat 5.

Daerah Kabupaten/Kota⁶³. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih⁶⁴.

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota⁶⁵. Sebelum memegang jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji⁶⁶. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan⁶⁷. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut⁶⁸.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan⁶⁹. Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 34 ayat 6.

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 35.

⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 38 ayat 1.

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 38 ayat 2.

⁶⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 39 ayat 1

⁶⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 39 ayat 2.

⁶⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 41.

diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis⁷⁰. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota⁷¹. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis⁷². Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian⁷³.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan

⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 48.

⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 48 ayat 2.

⁷² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 52 ayat 1.

⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 52 ayat 2.

unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa⁷⁴. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa⁷⁵.

3. Otonomi Desa

Perkataan *otonomi* atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan. Dalam konsep etimologis ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai *zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri, perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri⁷⁶.

Sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri.
- b. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan oleh sendiri.

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 54 ayat 1.

⁷⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 60.

⁷⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 7.

- c. Melakukan pengaturan, pengurusan dan hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan yang dibuat sendiri.
- d. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undnagan diatasnya⁷⁷.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah polapemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan baru tentang Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Hal ini disebabkan kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara”. Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

⁷⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014), h 111.

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah

daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan⁷⁸.

Menurut Sabarno, pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional⁷⁹.

Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk

⁷⁸<http://politik.kompasiana.com/2014/09/16/otonomi-daerah-dalam-pembangunan--688380.html>, (10 Agustus 2017)

⁷⁹Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h 31.

mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. pengertian luas dalam penyelenggaraan

otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Pemerintah daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, otonomi bukanlah semata-mata menggunakan pendekatan administratif atau sekedar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja saja, akan tetapi sekaligus pendekatan dalam dimensi politik. Dengan demikian, makna kewenangan dibidang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sejauh mungkin harus dapat dilayani secara dekat dan cepat.

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat

melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan⁸⁰. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat⁸¹.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan,

⁸⁰ Widjaja, HAW. *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h 165.

⁸¹ Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008) hal 43.

dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan⁸².

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa⁸³.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor

⁸² Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1 dan 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h 12.

⁸³ Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) hal 67.

peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁴. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli⁸⁵.

B. Konsep Kemampuan Perangkat Desa

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan.⁸⁶ Sementara itu, menurut Kartono bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa⁸⁷. Lebih lanjut, beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam

⁸⁴ Widjaja, HAW. *Op.Cit*, h 166.

⁸⁵ Muchsan, *Otonomi Daerah dan Ketidakadilan Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2000) h 39.

⁸⁶ Cece, Wijaya, Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), h 3.

⁸⁷ Kartono, Kartini. 2012. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan. Abnormal Itu? – Ed. 1, Cet, 18 -.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 13.

pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto mengemukakan bahwa kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan⁸⁸. Sementara itu, menurut Steers dalam bahwa kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman. Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu:

1. Technical Skill (Kemampuan Teknis)

Adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja.

2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi)

Adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok suasana dimana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah.

3. Conceptual Skill (Kemampuan Konseptual)

⁸⁸Tjiptoherianto. *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan*. (Yogyakarta: PT Pustaka LP3ES. 2008) h, 36.

Adalah kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami di antara unsur-unsur itu.

Menurut pengertian diatas, kemampuan teknis yang dimaksud adalah seorang di dalam organisasinya harus mampu dalam penguasaan terhadap metode kerja yang ada. Artinya bahwa seorang yang mempunyai kemampuan teknis yang meliputi prosedur kerja, metode kerja dan alat-alat yang ada seperti yang telah dinilai dapat meningkatkan hasil kerja sehingga lebih maksimal. Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bekerja dengan team work atau kelompok kerja, yakni dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi.

Anggota organisasi yang dimaksud adalah perangkat desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja yang maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat maupun saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik.

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan *demokratik*, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut,

pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.

C. Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Sebelum menjelaskan konsep/pengertian administrasi pemerintahan terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep administrasi dan pemerintahan. Menurut Siagian (2008:2) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁸⁹

Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan

⁸⁹ Sondang, P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta:Bumi Aksara, 2008) h 2.

Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan (Wasistiono, 2006: 4). Lebih lanjut Sadu Wasistiono mengatakan bahwa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.⁹⁰

Langkah kongkrit upaya pengembangan Desa antara lain berupa lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah guna memodernisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen pembaharuan.

1. Pengertian Administrasi

Secara etimologis, *administrasi* berasal dari bahasa latin *ad+ministrare*, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menunjang, atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda *administratio* dan kata sifat *administrativus*. Untuk Indonesia yang tepat digunakan istilah administrasi.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari

⁹⁰ Sadu Wastiono, *prospek pengembangan Desa* (Bandung: CV.Fokusmedia, 2006).h 4.

administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri. Administrasi diartikan sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teknis.

Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya

Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

- a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
- b. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan.
- c. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
- d. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Ada dua persepektif umum mengenai ruang lingkup dari administrasi.

Perspektif yang pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif ini terutama pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya, serta bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perspektif selanjutnya adalah perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap, pendekatan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator. Stephen P. Robbin mengatakan bahwa perilaku administrasi dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma pendidikan, dan pengalaman.

2. Administrasi Desa

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016:

- a. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah Desa pada Buku Administrasi umum, terdiri dari:
 - 1) Buku Peraturan Di Desa
 - 2) Buku Keputusan Kepala Desa
 - 3) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa
 - 4) Buku Aparat Pemerintah Desa
 - 5) Buku Tanah Khas Desa
 - 6) Buku Agenda

- 7) Buku Ekspedisi dan
 - 8) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
- b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi, terdiri dari:
- 1) Buku Induk Penduduk
 - 2) Buku Mutasi Penduduk Desa
 - 3) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
 - 4) Buku Penduduk Sementara dan
 - 5) Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
- c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
- 1) Buku APD Desa
 - 2) Buku Rencana Anggaran Biaya
 - 3) Buku Kas Pembantu Kegiatan
 - 4) Buku Kas Umum
 - 5) Buku Kas Pembantu dan
 - 6) Buku Bank Desa.
- d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan, Terdiri dari:
- 1) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa
 - 2) Buku Kegiatan Pembangunan
 - 3) Buku Inventaris Hasil-Hasil Pembangunan dan

- 4) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa
 - 2) Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa
 - 3) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri.

Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya.

Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

- a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
- b. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha

- berskala besar maupun kecil-kecilan;
- c. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus;
 - d. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁹¹

Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan aktifitas ditingkat desa, maka berbicara tentang administrasi desa berarti yang dimaksud dengan "administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemerintahan, seperti antara lain, baik dalam menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mengacu pada pengertian diatas berarti konsep administrasi terbagi dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas berarti segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah segenap penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, Surat menyurat, beserta penyimpanan, pengurusan masalah-masalah dan segala pencatatannya dilaksanakan oleh aparat dalam arti pencapaian tujuan.⁹²

Selanjutnya konsep/pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam kajian

⁹¹ Syafii, Inu Kencana, Djamaludin Tanjung, dan Supardan Modeong, *Ilmu Administrasi Publik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). h 17.

⁹² Prof. Drs. Haw. Widjaja, *Otonomi Desa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h 88

sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah dibedakan dengan istilah pemerintahan. Menurut Saparin⁹³ untuk membedakan pengertian kedua konsep tersebut, maka perlu diterangkan secara etimologis, yaitu :

- a. Pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri, contoh Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintahan adalah kata jadian yang disebabkan karena subjeknya mendapat akhiran "an" yang artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas-tugas atau kegiatan, dimana cara melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan.

Ada dua persepektif umum mengenai ruang lingkup dari administrasi. Perspektif yang pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif ini terutama pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya, serta bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perspektif selanjutnya adalah perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap, pendekatan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator.

Dari uraian diatas nampak istilah pemerintah menunjuk kepada aparat yaitu para pelaksana pemerintahan, sedang istilah pemerintahan menunjuk pada aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berarti "Pemerintahan" adalah keseluruhan tindakan atau kegiatan aparat pemerintah

⁹³Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. (Yogyakarta: Laper. Pustaka Utama, 1996). h 21.

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

D. Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 bagian h mengatakan salah satu tugas pemerintahan desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekertaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan pelaksana Teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan konsep-konsep diatas bahwa pendidikan dan latihan merupakan masalah penting dalam pemerintahan desa karena untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahandesa diperlukan tenaga-tenaga yang berkualitas dan terampil, hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi jelaslah bahwa pendidikan perangkat desa dalam suatu pemerintahan desa merupakan upaya dalam meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan perangkat desa, dimana perangkat desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode-metode pengembangan diri terdiri dari:

1. Metode latihan (*training method*) Menurut Hasibuan⁹⁴ Metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagi faktor yaitu waktu, biaya, jumlah, peserta, tingkat pendidikan dasar peserta dan latar belakang peserta metode ini diberikan kepada aparatur desa

⁹⁴ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (cetakan kesembilan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h 77.

operasional.

2. Metode pendidikan (*education method*) Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin paraa bawahannya secara efektif. Seorang manajer yang efektif pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengerucutkan bahwa proses pengembangan SDM yang nantinya akan menunjukkan proses peningkatan kemampuan dari perangkat desa adalah ada pada proses ketrampilan, pendidikan dan pelatihan terhadap perangkat desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, adapun pemilihan lokasi penelitian berdasarkan hasil dari pengamatan penulis di Desa Patimpa terhadap aparatur desa yang dimana kurang tertibnya pelaksanaan administrasi baik itu kedisiplinan kerja maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen dipilih secara sengaja yang terdiri dari beberapa instrumen yang dianggap memiliki pengetahuan permasalahan yang dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan administrasi di desa Patimpa, Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut, maka

penulis menggunakan *purposive sampling*. Tekning sampling yang digunakan peneliti ini adalah teknik yang digunakan ketika peneliti mempunyai pertimbangan – pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya¹. Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Tiga Orang Kepala Urusan
4. Kepala Dusun Sejumlah 2 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap ide , tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan di atas,

¹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6.(Jakarta : Rineka Cipta, 2009). h 128.

untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam melaksanakan Tugas Administrasi Desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal buku-buku yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan upaya – upaya peningkatan kemampuan aparatur Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas Administrasi Desa.

C. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model kualitatif . Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan². Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis

²Matthew Miles B dan Huberman A Michael. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). h 16.

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema atau pola (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pembuatan tabel).

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh, dan integrative yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat *grounded* (dasar).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sekilas tentang sejarah desa Patimpa, peneliti mencoba mengambarkannya sebagai berikut. Pada zaman Indonesia pasca kemerdekaan, ada suatu daerah yang diduduki oleh DI/TII (darul islam/tentara islam Indonesia) yang dimana latar belakangnya adalah mendirikan negara islam khususnya disulsel jadi tidak dipungkiri pergerakan DI sampai ditanah Bone termasuk desa Patimpa untuk mencari kedudukan didaerah ini. Pada saat itu daerah ini masih belum banyak penduduknya (sekitar 15-20 rumah), dengan kedatangan DI ke daerah ini, para penduduk merasa ketakutan . Untuk merebut daerah ini DI menjadikan Patimpa sebagai markas, perlu diketahui pada awalnya desa Patimpa memiliki nama lain yaitu Kajuara semasa kedudukan DI di daerah ini setelah Tentara Nasional bersama rakyat berhasil merebut kembali daerah ini maka berganti pula nama Kajuara menjadi Patimpa.

Desa Patimpa adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Wilayah Desa Patimpa yang strategis menjadikan daerah tersebut menjadi ibu kota kecamatan dengan radius kurang lebih 14 Km dari ibukota Kabupaten Bone dengan diantaranya:

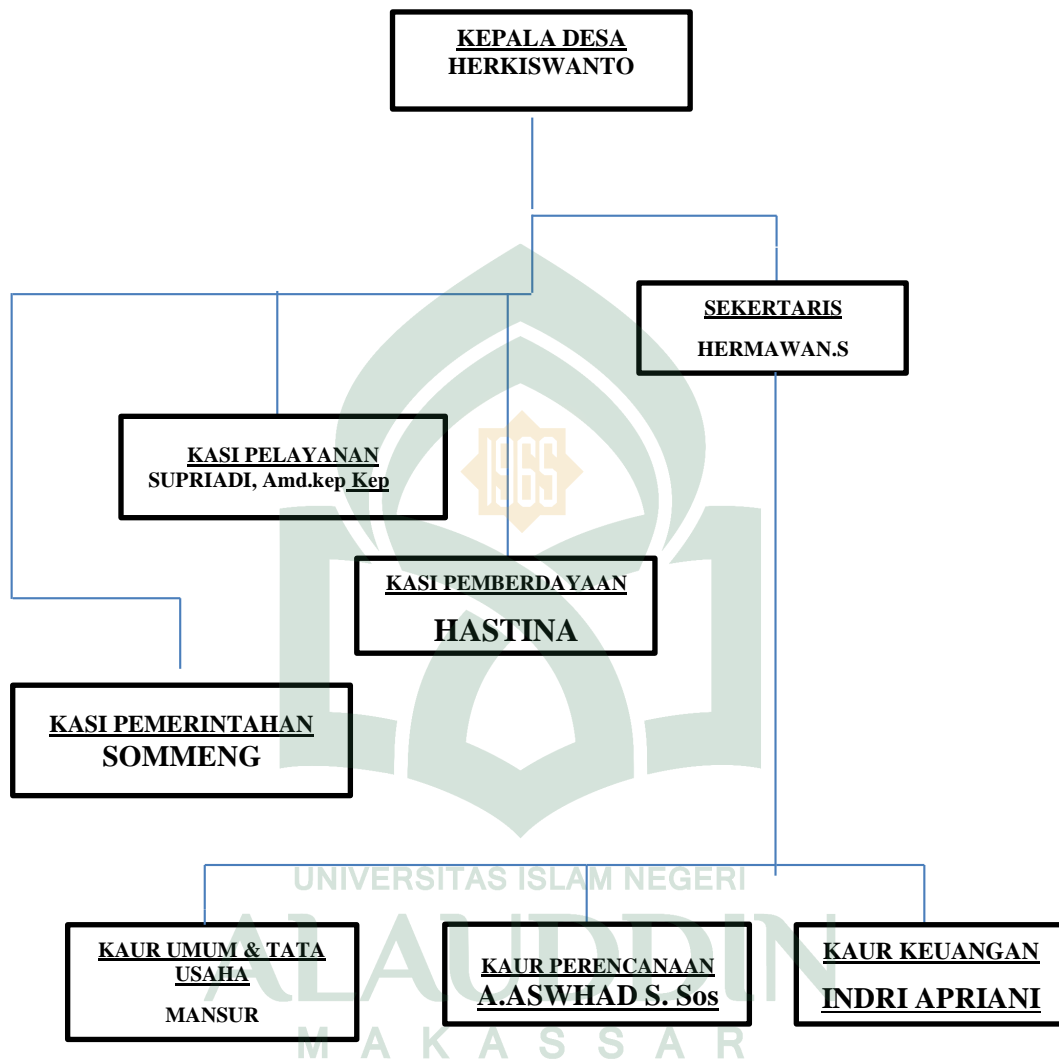
Sebelah Utara	: Desa Kanco
Sebelah Timur	: Desa Bolli
Sebelah Selatan	: Desa Salebba
Sebelah Barat	: Desa Polionro

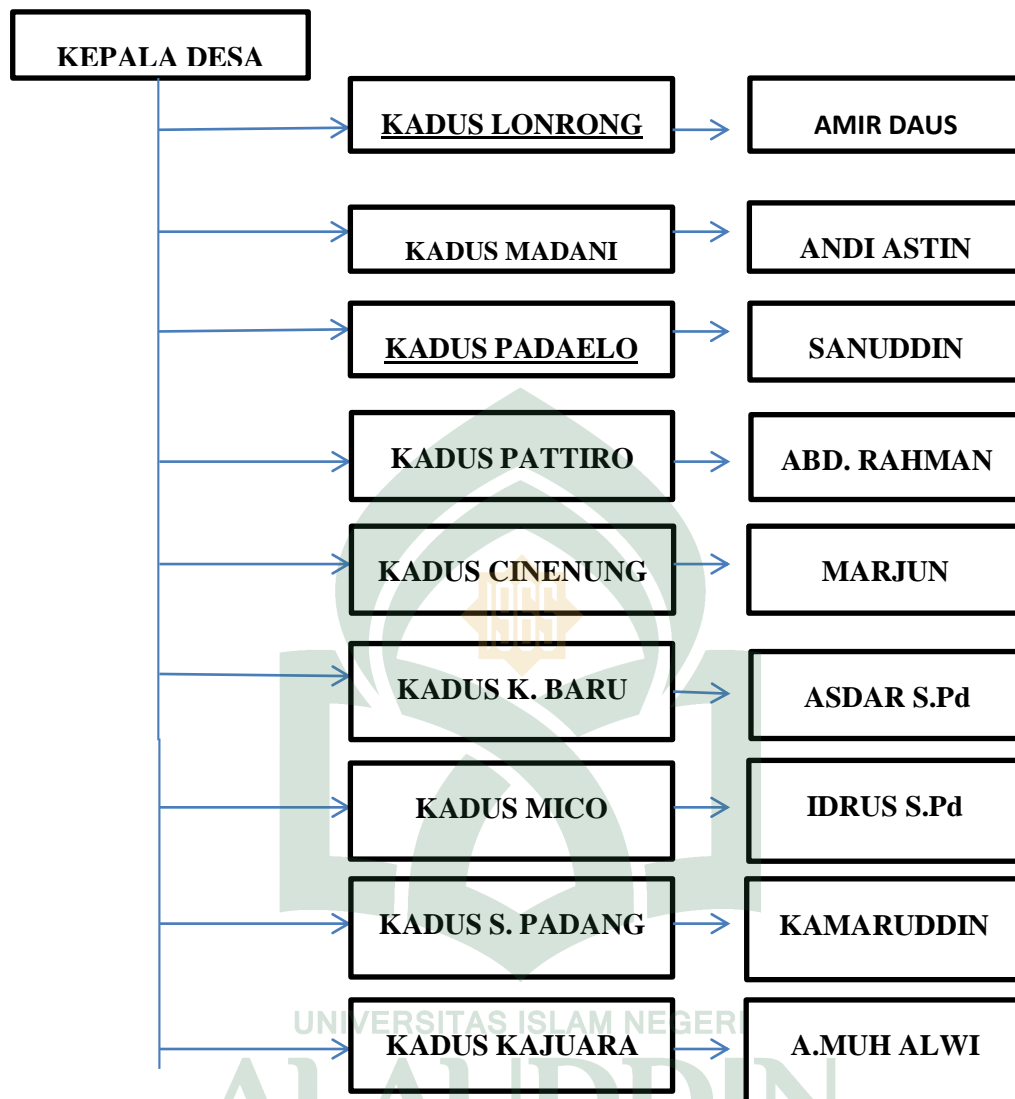
Desa Patimpa terdiri dari 9 wilayah dusun diantaranya : Dusun Cinennung, Dusun Padaelo, Dusun Kajuara, Dusun Lonrong, Dusun Saliweng Padang, Dusun Madani, Dusun Pattiro, Dusun Kampung Baru dan Dusun Mico. Desa Patimpa sendiri terdapat 9 rukun warga (RW) dan 17 rukun tetangga (RT). Di Desa Patimpa juga dijadikan lahan perkebunan tebu oleh Perusahaan Tebu BUMN , keberadaan lahan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat karena masih banyak menggunakan tenaga manusia untuk mengelola lahan tersebut sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja.

B. Struktur Organisasi dan Tupoksi Pemerintah Desa

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka untuk meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan kelancaran tugas-tugas Pemerintah Desa dapat digambarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Patimpa





Kemudian tiap perangkat desa diatas memiliki kewenangan dan tugas masing-masing yang meliputi:

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan maslah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataanpengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan saran prasaran perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemeberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagai man dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi pengasihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta lembaga pemerintah desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam meningkatkan kemampuan Aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone ada beberapa cara yaitu peningkatan disiplin kerja aparatur serta pengadaan pendidikan dan pelatihan.

1. Pembinaan Disiplin Aparat

Adapun bentuk penerapan disiplin aparat Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Menurut pengamatan penulis bahwa penerapan disiplin waktu jam kerja pada dasarnya belum dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran disiplin waktu bagi Aparatur Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone cenderung terjadi.

Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin ditinjau dari aspek ketepatan dan kebutuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah ditentukan pada setiap hari kerja. Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa umumnya aparat pemerintan Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau dengan kata lain, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh negatif dan dapat menghambat kemampuan terhadap pelaksanaan tugas-tugas administrasi dalam adalah ketidakdisiplinnya aparat desa pelaksanaan tugas mereka.

Salah satu contoh ketidakdisiplinannya perangkat desa adalah masih rendahnya kehadiran setiap aparat desa mewujudkan kedisiplinan, terutama disiplin dalam hal ketepatan dan kepatuhan terhadap waktu/jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan pada setiap hari kerja.

Hal ini menandakan bahwa dari segi disiplin waktu aparatur Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam masuk kerja masih belum menunjukkan optimalisasi dalam disiplin kerja. Berdasarkan hasil. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone mengatakan bahwa rendahnya kehadiran pegawai dikarenakan kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati aturan yang berlaku di kantor Desa dan juga sebagian aparatur desa berprofesi sebagai petani. Oleh karena pembinaan disiplin pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran efisiensi dan efektifitas kerja pegawai guna mencapai pelaksanaan tugas kantor dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Kepala Desa yang paling menonjol dalam kegiatan administrasi di dalam adalah pemberdayaan aparat desa di arahkan untuk meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kerjanya.

Pemberdayaan aparat sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam dunia kependudukan yang demikian cepat sehingga membutuhkan aparat yang profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Guna meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan yang semakin kompleks maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone telah melaksanakan pemberdayaan terhadap aparatnya.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone diharapkan nantinya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat desa usaha melayani kepentingan masyarakat. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan adalah bertujuan:

- a. Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelolah kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan mereka.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handoko yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas untuk memperbaiki dan meningkatkan

pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat- sifat kepribadian¹

Adapun bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh aparat Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

a. Pelatihan Teknis Administrasi Keuangan

Gambar 4.2. Pelatihan dalam bentuk pengelolaan keuangan



Salah satu peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dengan mengadakan pelatihan salah satunya adalah Pelatihan Administrasi Keuangan dimana seluruh perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Bone mengikuti Pelatihan dalam bentuk Pengelolaan Keuangan. Hal ini bertujuan melatih serta memberikan wawasan atau pendidikan tentang administrasi terutama di bagian keuangan.

b. Pelatihan Administrasi Pertanahan Pemerintah Desa

Dalam pelatihan tersebut seluruh aparatur desa mengikuti

¹Handoko, H. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: BFFE, 2006) h 104.

pelatihan tersebut se Kabupaten Bone dimana pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada aparat desa tentang pengelolaan administrasi pertanahan. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah, pemasangan patok atau batas tanah, pencatatan jumlah dan luas tanah yang dimiliki desa dan masyarakat, pemberian nomor registrasi agenda pertanahan serta administrasi pertanahan lainnya yang telah diberikan pemerintah desa yang secara khusus telah memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan serta telah melakukan koordinasi dan evaluasi dengan lembaga atau instansi terkait urusan pertanahan.

c. Peningkatan Kapasitas Aparat dan Perangkat Desa

Pelatihan tersebut dilaksanakan di Makassar pada waktu itu dimana aparat desa melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas masing-masing perangkat desa.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral aparatur desa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.²

²Hasibuan, Melayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kesembilan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007) h 69.

D. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi pemerintah dalam demikian luas dan kompleks (administrasi dalam arti luas) yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat desa juga demikian adanya, karena perangkat desa adalah merupakan salah satu unsur pemerintahan dalam, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas perangkat desa dalam arti sempit (ketatausahaan) yang meliputi: surat-menyurat dan penyimpanannya (kearsipan).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut dan disesuaikan dengan kedudukan desa berdasarkan Undang – Undang tentang Desa No 6 Tahun 2014 dan PP tentang desa No. 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan mencakup pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan serta pembinaan masyarakat desa dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum, dan yang terakhir adalah pembangunan yang mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dibutuhkan suatu pencatatan yang detail. Register adalah suatu aktivitas pemerintahan dengan maksud untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa dan kegiatan yang telah terjadi melalui pencatatan-pencatatan di dalam format

yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Patimpa sebagai berikut:

“Setiap kegiatan yang dilakukan di Desa Patimpa pasti ada datanya”³

Pernyataan di atas pun didukung dengan data yang ada pada Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat pada tahun 2016 bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan sanitasi, pembangunan jalan tani, saluran air untuk warga.

2. Pelayanan Masyarakat

Dalam hal pelayanan masyarakat, pemerintah Desa Patimpa sangat memperhatikan, hal ini dibuktikan dengan mudahnya kepengurusan dalam berbagai surat-surat penting maupun dokumen penting seperti surat tanah, bea balik nama, sampai kartu tanda penduduk (KTP). Seluruh pencatatan tertata rapi. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris desa bahwa semua pencatatan sudah tertata rapi tanpa adanya kekurangan berkas-berkasnya. Semua itu tercatat di Buku Induk. Buku Induk Penduduk adalah buku tempat mencatat seluruh penduduk yang menjadi warga di dalam tersebut, serta berbagai karakteristik yang melingkupi, setiap warga individu.

Dari 19 kolom yang tersedia pada daftar register tersebut, yaitu secara berturut-turut antara lain kolom nomor urut, nama lengkap/panggilan, jenis kelamin, status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dapat membaca huruf,

³ Herkiswanto, Kepala Desa Patimpa, Wawancara, 12 Februari 2017

kewarganegaraan, alamat lengkap, kedudukan dalam keluarga, nomor KTP, nomor kartu keluarga dan kolom keterangan. Ternyata masih banyak kolom, pengisian yang tidak terisi seperti antara lain status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, nomor KTP dan nomor Kartu Keluarga.

Dengan adanya berbagai macam pengisian yang baru, kadang kala membuat perangkat desa yang menginput data mengalami kesusahan, hal ini diungkapkan oleh bapak Kepala Desa sebagai berikut:

“ada kalanya perubahan bentuk format yang semakin banyak menyebabkan kebingungan, apalagi ketika ada input data pada program baru, perlu adanya penyuluhan atau pelatihan untuk mengoperasikan program tersebut”⁴

3. Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketertiban dan ketentraman juga menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh Kepala Desa yaitu peningkatan kegiatan dari masyarakat desa termasuk dalam menggalakkan Siskamling atau ronda malam. Hal ini dikarenakan masih rawannya daerah Patimpa yang menyebabkan pencurian, perampokan terjadi, sehingga perlu diadakannya ronda untuk menjaga ketentraman masyarakat desa. Dalam hal administrasi ketertiban yang dijaga juga berupa dalam ketertiban pembayaran iuran kebersihan, kemudian ketertiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

⁴ Herkiswanto, Kepala Desa Patimpa, Wawanca, 12 Februari 2017.

“Kami perangkat desa juga berusaha untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dari masyarakat desa seperti mengadakan Siskamling, ronda malam, dan sebagainya. selain itu dalam bidang administrasi juga ada penertiban iuran kebersihan, kemudian pembayaran PBB”⁵

4. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Pada beberapa tahun yang lalu curah hujan yang tinggi mengguyur daerah Bone sehingga berpengaruh terhadap sarana yang ada untuk pelayanan umum seperti jalan raya yang berlubang penyempitan jalan dan lain sebagainya butuh waktu hingga 2-3 tahun untuk perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berikut adalah gambaran jalan yang telah mengalami perbaikan :

Gambar 4.3. Kondisi Jalan



Kemudian berdasarkan hasil observasi penelitian, penulis masih

⁵ Sommeng, Kasi Pemerintahan, Wawancara, 14 Februari 2017.

menemukan ada beberapa kelemahan dalam penanganan administrasi desa.

Seperti pembuatan RPJMDes yang masih belum tertata rapi.

Faktor kemampuan dan keterampilan setiap aparat pada bidang tugas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu faktor penentu efektif tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa faktor ini kurang dimiliki oleh setiap aparat/perangkat Desa Patimpa, meskipun tingkat pendidikan formal setiap aparat dinilai cukup memadai, dan terkait dengan kurang mampunya para kepala-kepala urusan maupun Kasun dalam menyampaikan berbagai laporan atau data yang dibutuhkan oleh bagian sekretariat untuk kebutuhan pencatatan register.

Untuk melatih ketrampilan ini, Kepala Desa Patimpa mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang administrasi desa, seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“untuk melatih ketrampilan perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi desa, saya merencanakan adanya pembinaan kedisiplinan aparatur desa, serta pendidikan dan pelatihan di setiap tahunnya”⁶

Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat desa usaha melayani kepentingan masyarakat, maka dari itu, aparatur desa diupayakan cepat dan tanggap dalam kepengurusan administrasi desa.

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan

⁶ Herkiswanto, Kepala Desa Patimpa, Wawancara, 12 Februari 2017.

efektifitas kerja Pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsi organisasi adalah melalui pembinaan disiplin, hal ini dimaksudkan agar para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.

Usaha untuk meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan disiplin, diperlukan suatu pedoman atau kerangka yang memuat dengan jelas sistem metode dan prosedur pembinaan serta tujuan dan sasaran setiap bentuk pegawai yang bermental baik berdaya guna, berhasil guna dan sadar akan tanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dengan memperhatikan hasil penelitian pada Bab IV maka penulis menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan disiplin kerja aparatur serta melakukan pendidikan dan pelatihan. Adapun bentuk penerapan disiplin aparatur Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi desa yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah

- a. Pembinaan disiplin aparat

Dimana kedisiplinan sangat diperlukan guna terlaksana tugas dengan efektif.

- b. Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral aparatur desa sesuai

dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas administrasi
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa
 - b. Pelayanan masyarakat
 - c. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembinaan disiplin pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran efisiensi dan efektifitas kerja pegawai guna mencapai pelaksanaan tugas kantor dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh seluruh aparatur desa, sehingga diharapkan untuk kedepannya, Kepala Desa lebih melakukan pengawasan yang ketat terhadap kedisiplinan pegawai.
2. Selain itu pihak desa harus lebih inisiatif dan kreatif lagi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan di organisasi Desa Morowudi, bukan hanya mengandalkan pendidikan maupun pelatihan dari Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Bone
3. Peran aktif masyarakat desa sangat dibutuhkan bagi pemerintah desa sebab peran seta masyarakat aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup yang

lebih baik, aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya di desa demi mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera adil dan makmur.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Cece, Wijaya, Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung: 2011.
- Daldjoni, N, *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Gibson. Ivanovic. dan Donnely. *Organisasi dan manajemen. Perilaku, struktur, proses*. Edisi Keempat. Jakarta: 1994.
- Handoko, H. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BFFE, 2006.
- Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hasibuan, Melayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. Kesembilan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- I Nyoman Beratha, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014
- Kansil, C. S. T. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Miles, Mathew B dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moenir, A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muchsan, *Otonomi Daerah dan Ketidakadilan Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1996.
- Sondang, P. Siagian. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Syafii, Inu Kencana, Djamaluddin Tanjung, dan Supardan Modeong. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1 dan 2

.Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Tjiptoherijanto. *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan*.

Yogyakarta: PT Pustaka LP3ES 2008.

Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Penerbit Tarsito, 1984.

Wastiono, Sadu. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Cv. Fokusmedia, 2006

Widjaya. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. *Analisis Kemampuan Kerja Aparat Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat*. 2012.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa.html> (9 Agustus 2017).

http://www.academia.edu/11080401/Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Desa_Berdasarkan_UU_DESA.html, (10 Agustus 2017).

<http://politik.kompasiana.com/2014/09/16/otonomi-daerah-dalam-pembangunan--688380.html>, (10 Agustus 2017)

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa*.

Republik Indonesia. *Undang-undang No 23 Tahun 2014*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*,

RIWAYAT HIDUP



Nama saya adalah Achmad Arif Gunawan biasa di panggil arif saya adalah calon sarjana Hukum dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saya lahir di Watampone tepatnya di Kabupaten Bone 30 Januari 1995. Saya anak sulung dari empat bersaudara dua

perempuan dan satu laki-laki yang di mana nama dari adik-adik saya yaitu Aprilia Dwi Hastika serta Abdillah Ramadhan dan Khumairah Inayah Hastika, Aprilia dan Abdillah Masih mengenyam pendidikan di kota watampone dan juga lahir di kota yang sama dengan saya sedangkan khumairah masih balita berumur 8 bulan dan lahir di kota makassar. Kedua Orang tua saya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Hukum Dan HAM yang telah mengabdikan sebelum mereka bertemu. Bapak saya lahir di kota watampone dan tumbuh besar di kota tersebut sedangkan mama saya lahir di kota sorong tepatnya di papua barat tapi mereka bertemu ketika dewasa di kota watampone atau lebih jelasnya di Kabupaten Bone ketika mereka bertemu bapak saya sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kedua orang tua saya merupakan motivator bagi hidup saya begitu banyak hal atau pengalaman hidup yang mereka ajarkan kepada saya. Karena tanpa kedua orang tua, saya tidak akan pernah tahu seperti apa bentuk dunia, tidak akan tahu seperti apa cinta dan kasih sayang darinya dan tidak akan pernah

merasakan yang namanya hidup. Hobi saya adalah jalan-jalan, snorkeling, diving dan futsal. Saya orangnya aktif dan susah untuk berdiam diri jadi hobi saya kebanyakan di luar/outdoor. Keluarga saya termasuk keluarga yang lumayan taat beribadah, dari kecil saya sudah di ajarkan mama untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu. Waktu kecil sampai sekarang setiap adzan datang, mama selalu cerewet menyuruh saya segera melaksanakan sholat karena mama mengatakan jika memalaikan sholat berarti kita meruntuhkan tiang agama islam dan termasuk kedalam golongan orang kafir. Ketika berumur 5 tahun saya pun di anjurkan untuk bersekolah di SD agar bisa belajar. Ketika usia saya menginjak 5 tahun saya langsung menduduki bangku SD, mungkin sebagian berpikir kenapa tidak pada umur 6 tahun? Padahal pada umumnya anak-anak disekolahkan untuk memasuki Sekolah Dasar pada usia 6 tahun. itu dikarenakan saya sudah bisa membaca dan berhitung dan mama saya mengatakan saya sudah layak memasuki Sekolah Dasar di kota saya sendiri. Saaat itu saya bersekolah di SDN 10 Watampone dikarenakan orang tua saya pindah rumah maka tempat saya bersekolahpun juga pindah di SD INPRES 10/73 WT Palakka. Akhirnya setelah enam tahun menuntut ilmu di Sekolah Dasar dan siap melanjutkan pendidikan di tingkat SMP. Saya Memilih melanjutkan pendidikan ke SMPN 4 Watampone setelah tamat SMP saya melanjutkan sekolah ke SMAN 4 Watampone karena sebagian teman-teman saya juga lanjut kesekolah tersebut maka sayapun demikian. Di SMA banayak hal yang berbeda daripada SMP mulai dari teman-teman baru, pelajaran bahkan banyak suka maupun duka yang saya rasakan ketika duduk dibangku SMA, sama halnya di SMP bahkan di SMA juga saya berorganisasi, ketika Tamat SMA saya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu UIN ALAUDDIN

MAKASSAR ketika pendidikan semakin tinggi maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia bertambah pula kita dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan hidup dengan penuh tanggung jawab demikian autobiografi singkat dari saya.



SURAT PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD ARIF GUNAWAN
NIM : 10500113280
Semester/Klpk : 6 (Enam)/Ilmu Hukum F
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- ① Upaya Peningkatan Kemampuan Perangkat desa Dalam Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.
2. Faktor-faktor Keistimewaan Dari Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014.
3. Pandangan MASYARAKAT Desa Terhadap Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

MAKASSAR 20 Juni - 2016

Mengetahui,
Penasehat/Akademik

[Signature]
And. Safriani, SH, MH.
Nip. 19831122 260912 2002

Pemohon

[Signature]
(Achmad Arif Gunawan)

2/11/16

[Signature]

Rehman Syamsuddin

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI / MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Upaya Peningkatan Kemampuan Perangkat desa Dalam Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone ? 2. Mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Upaya Peningkatan Kemampuan Perangkat desa Dalam Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone ? <p>JUDUL SKRIPSI</p> <p>Upaya Peningkatan Kemampuan Perangkat desa Dalam Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone</p>	<p align="center">28/11/16.</p>	 <i>Kahar Supriatna</i>
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Faktor-faktor Keistimewaan Dari Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 ? 2. Hal-hal Yang Ditimbulkan Dari Keistimewaan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 ? <p>JUDUL SKRIPSI</p>		



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : **679** Tahun 2016

**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Menunjuk saudara : **1. Dr. Jumadi., SH., M.H**
2. Andi Safriani., SH., M.H

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Achmad Arif Gunawan
NIM : 10500113280
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Upaya Peningkatan Kemampuan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Adminitrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 01 Desember 2016



LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENINGKATAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA PATIMPA
KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan Oleh :

Achmad Arif Gunawan

NIM: 10500113280

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi

Pada tanggal : Januari 2017

DOSEN PEMBIMBING

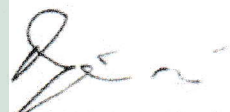
Pembimbing I



Dr. Jumadi, SH., MH

NIP. 19630204 199403 1 003

Pembimbing II



Andi Safriani, SH., MH

NIP. 19831122 200912 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

ALAUDDIN
MAKASSAR

Istiqamah, SH. MH

NIP. 196801120 199503 2 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/ 38 /2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 9 Januari 2017

Kepada
Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan**
Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Achmad Aarif Gunawan
N I M	: 1050011320
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Ilmui Hukum
Semester	: VII (Tuju)
Alamat	: Perum. Baruga Samata Blok C Nö. 8

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

"Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone"

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. Jumadi., SH.M.H**
2. **Andi Safriani., S.H., M.H**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone terhitung mulai tanggal 13 Januari 2017 s/d 13 Februari 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 0 2 8 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 271/S.01P/P2T/01/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/382017 tanggal 09 Januari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ACHMAD AARIF GUNAWAN**
Nomor Pokok : 10500113280
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA PATIMPA KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE "

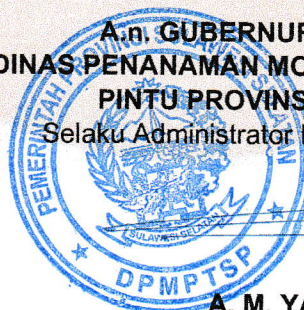
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Januari s/d 20 Februari 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Januari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Bertanggungjawab

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Achmad Arif Gunawan**, NIM: 10500113280, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Patiampa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

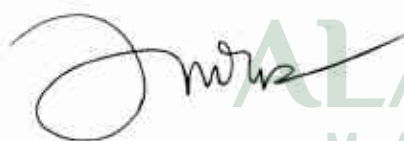
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 26 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Dr. Jumadi., S.H.,M.H
NIP.196302041994031003



Dr. Andi Safriani.,S.H.,M.H
NIP. 198311222009122002

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1059 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Achmad Arif Gunawan
N I M : 10500113280
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 02 Agustus 2017
Perihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : " Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H
Penguji I : Istiqamah, S.H., M.H
Penguji II : Azhar Sinilele, S.H, M.H
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata
: 31 Juli 2017

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulisan skripsi Saudara Achmad Arif Gunawan, NIM: 10500113280, mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan berjudul "Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses selanjutnya.

Samata, 9 Agustus 2017

Penguji I



Istiqamah, S.H., M.H
NIP. 19680120 199503 2 001

Penguji II

Azhar Sinelele, S.H., M.M., M.H
NIP. 19690717 201411 1 001

Pembimbing I



Dr. Jumadi, S.H., M.H
NIP. 19630204 199403 1 003

Pembimbing II



Dr. Andi Safriani, S.H., M.H
NIP.19831122 200912 2 002